

**PENGATURAN *GENUINE LINK* KEBANGSAAN KAPAL
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA (UNCLOS) 1982* DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Stata 1
(Sarjana)*

SKRIPSI



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2015



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa ARIEF RACHMAN	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Basung, 17 Maret 1993	f) Tanggal Lulus : 29 Oktober 2015	
b) Nama Orang Tua : Nasrial dan Mahdalena	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,39	
d) PK : Hukum Internasional	i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan	
e) No. BP : 1110112191	j) Alamat : Jl. Rasuna Said No.145, Lubuk Basung, Agam.	

PENGATURAN GENUINE LINK KEBANGSAAN KAPAL DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Arief Rachman, 1110112191, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 halaman, 2015)

ABSTRAK

Kebebasan di laut lepas membutuhkan pembatasan agar kebebasan negara lainnya tidak terganggu. *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* memiliki kelemahan dalam hal pembatasan ini, dimana pengaturan pemberian kebangsaan kapal dan *genuine link* kebangsaan kapal sebagai bentuk pembatasan kebebasan belum diatur secara jelas sehingga memberikan celah terjadinya penggunaan bendera kapal secara pura-pura. Skripsi ini juga meninjau bagaimana implementasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan *genuine link* kebangsaan kapal. Dalam penulisan ini penulis 2 rumusan masalah, yakni : 1). Bagaimana pengaturan *genuine link* kebangsaan kapal dalam UNCLOS 1982; 2). Bagaimana implementasi pengaturan *genuine link* kebangsaan kapal menurut hukum nasional Indonesia. penulisan menggunakan metode penelitian; tipe penelitian adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner, yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan konseptual, interpretasi dan historis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil ; pengaturan kebangsaan kapal dalam UNCLOS 1982 terkait dengan persyaratan pemberian kebangsaan, bukti kebangsaan, dan status hukum kapal yang menjadi yurisdiksi negara-negara tidak memiliki pembatasan yang jelas serta tidak ada penjelasan komprehensif *genuine link* menurut UNCLOS 1982. Keadaan ini mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda oleh masing-masing negara. Indonesia mengakomodir *genuine link* kebangsaan kapal dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, pengaturan yang dilakukan Indonesia dilakukan dengan itikad baik terhadap *genuine link*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk mengatur lebih rinci sekaligus memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982 khususnya dalam hal *genuine link* kebangsaan kapal dan Pemerintah Indonesia melaksanakan pengawasan dalam hal pemberian kebangsaan kapal.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Oktober 2015.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Dr. Ferdi S.H., M.H.	Dr. Zulheri S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Internasional : **Magdariza S.H., M.H.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :		Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :		Nama:	Tanda Tangan: